

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.7.960.000,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.539.200.944 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.531.240.944),- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.6.530.000,- dan sebesar Rp sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(5.520.388.344),-

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember adalah sebesar Rp9.314.787.256,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(5.520.388.344,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp28.868.355,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.381.292.994,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 6.204.560.261,-

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**KANTOR STASIUN KIPM ACEH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	50.000.000	19.600.000	39,20	67.797.842
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>50.000.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>39,20</b>	<b>67.797.842</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	2.613.228.000,	2.613.195.568	100,00	4.899.474.400,
Belanja Barang	B.4	2.502.588.000,	2.475.739.568	98,93	3.522.245.373,
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!	63.487.865,
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>5.115.816.000</b>	<b>5.088.935.136</b>	<b>99,47</b>	<b>8.485.207.638</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**II. NERACA**

**KANTOR STASIUN KIPM ACEH  
NERACA  
PER 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	1.498	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang	C.7	7	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	40.055.759	67.236.172
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>40.057.250</b>	<b>67.236.172</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang	C.13	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	985.295.000	1.723.345.000
Peralatan dan Mesin	C.15	5.382.576.284	8.779.972.358
Gedung dan Bangunan	C.16	5.517.949.152	6.897.823.752
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	79.716.000	594.468.400
Aset Tetap Lainnya	C.18	41.802.500	41.802.500
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	- 5.830.339.571	- 8.778.053.349
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>6.176.999.365</b>	<b>9.259.358.661</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset	C.23	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>6.217.056.615</b>	<b>9.326.594.833</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	12.496.354	11.807.577
Utang Yang Belum Di tagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>12.496.354</b>	<b>11.807.577</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>12.496.354</b>	<b>11.807.577</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	6.204.560.261,	9.314.787.256
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>6.204.560.261</b>	<b>9.314.787.256</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>6.217.056.615</b>	<b>9.326.594.833</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**KANTOR STASIUN KIPM ACEH  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	7.960.000	61.855.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>7.960.000</b>	<b>61.855.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.613.194.070,	4.899.474.400,
Beban Persediaan	D.3	46.821.195,	293.386.953,
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.417.146.407,	1.788.305.707,
Beban Pemeliharaan	D.5	450.479.648,	433.817.598,
Beban Perjalanan Dinas	D.6	545.181.508,	990.610.465,
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	466.378.109,	681.010.412,
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	7	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>5.539.200.944</b>	<b>9.086.605.535</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(5.531.240.944)</b>	<b>(9.024.750.535)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	D.11		
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>		8.645.200	5.941.380
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		4.322.600	5.941.380
Pendapatan Pelepasan Aset		5.110.000	-
Beban pelepasan Aset		787.400	-
		6.530.000	1.462
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.530.000	1.462
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>10.852.600</b>	<b>5.942.842</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(5.520.388.344)</b>	<b>(9.018.807.693)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(5.520.388.344)</b>	<b>(9.018.807.693)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**KANTOR STASIUN KIPM ACEH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	9.314.787.256,	9.916.185.153,
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	E.2	(5.520.388.344,)	(9.018.807.693,)
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.3	28.868.355,	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	28.868.355,	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>28.868.355</b>	-
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	E.4	2.381.292.994,	8.417.409.796,
<b>KENAIKAN PENURUNAN EKUITAS</b>		(3.110.226.995,)	(601.397.897,)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>6.204.560.261</b>	<b>9.314.787.256</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun KIPM Aceh

<i>Dasar Hukum</i>	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Merupakan salah satu UPT dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada didaerah yang terletak di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar yang melaksanakan tindakan perkarantinaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan didaerah Provinsi Aceh dan Nasional pada umumnya memerlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan.
<i>Entitas dan Rencana Strategis</i>	Adapun pegawai di Stasiun KIPM Aceh berjumlah 28 orang yang terdiri dari 16 Orang ASN, PPNPN 4 orang dan PJLP 8 orang
	Rencana Strategis Stasiun KIPM Aceh :
	Terdiri dari 1 visi, 1 misi, 3 tujuan dan 4 sasaran antara lain:
	Visi : Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya

Misi :

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan sumberdaya manusia badan mutu.
3. Memberikan jaminan mutu produk perikan dan lingkungan melalui sertifikasi.
4. Menerapkan dan mengembangkan teknik dan metode perlakuan yang efektif.
5. Meningkatkan pengawasan operasional mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.
6. Pengembangan, penataan dan pemberdayaan organisasi yang lebih optimal.
7. Meningkatkan fungsi pelayanan terhadap pengguna jasa melalui pemanfaatan Sisterkarolin

8. Meningkatkan kinerja secara profesional dengan memanfaatkan sumber daya organisasi melalui pengembangan manajemen dan administrasi.

9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pelaksanaan hukum.

10. Meningkatkan jaringan kerjasama kemitraan dengan pemerintahan daerah, lembaga penelitian pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, LSM dan mitra kerja di lapangan (Angkasa Pura, Pelindo, Bea Cukai, BKHIT Aceh,, Kepolisian, dll).

11. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Sasaran :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
2. Terselenggaranya Pengendalian dan Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Aceh

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2024 Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Stasiun KIPM Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor

Stasiun KIPM Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Aceh. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Aceh adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-* **(1) Pendapatan- LRA**

*LRA*

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-* **(2) Pendapatan- LO**

*LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2023 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Stasiun KIPM Aceh memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.616.371.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Awal Satuan Kerja Kantor Sktasiun KIPM Aceh menjadi Rp. 5.115.816. Revisi dari DIPA awal disebabkan oleh adanya reorganisasi peralihan anggaran ke Badan Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Indonesia, program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan serta adanya Edaran dari kementerian Keuangan No. S-1023/MK/02/2024 Mengenai Langkah langkah penghematan Anggaran Belanja penghematan biaya perjalanan Dinas Kementrian /Lembaga TA 2024. Berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	50.000.000	50.000.000
Pendapatan Lain Lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	5.108.360.000	2.613.228.000,
Belanja Barang	3.508.011.000	2.502.588.000,
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>8.616.371.000</b>	<b>5.115.816.000</b>

*Realisasi*

### **B.1 Pendapatan**

*Pendapatan*

Rp19.600.000,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp19.600.000,- atau mencapai 39,2 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,- Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Aceh terdiri dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya dan Penerimaan kembali tahun anggaran Yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

<b>URAIAN</b>	<b>ESTIMASI PENDAPATAN</b>	<b>REALISASI PENDAPATAN</b>	<b>% REALISASI PENDAPATAN</b>
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	0,	5.110.000,	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya (42589)	50.000.000,	7.960.000,	15,92
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912)	0,	6.530.000,	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>50.000.000,</b>	<b>19.600.000,</b>	<b>39,2</b>

Realisasi Pendapatan Jasa Tahun 2024 TA 2024 mengalami penurunan sebesar 33,2 persen dibandingkan TA 2023. Pendapatan jasa karantina mengalami penurunan sebesar 100 persen dikarenakan Pendapatan jasa karantina sudah di alihkan ke Badan karantina Ikan , hewan dan tumbuhan Indonesia. Untuk pendapatan penjualan dan peralatan Mesin pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 5.110.000 yang merupakan hasil dari pelelangan asset aset SKIMP Aceh yang sudah memasuki umur asset yang tidak layak di gunakan lagi. Pendapatan akreditasi mengalami penurunan yang cukup signifikan

sebesar 72 persen disebabkan berkurangnya lalulintas pengiriman komoditas dan reorganisasi Lembaga sehingga sebagian pengujian beralih ke Badan Karantakan Ikan Hewan dan tumbuhan. Sedangkan untuk pendapatan lainnya bersumber dari pengembalian Belanja Tahun anggaran 2023 yang bersumber dari pengembalian belanja barang.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Karantina (42533)		225.000	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	5.110.000	-	#DIV/0!
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi (42528)	7.960.000	29.435.000	-72,96
Pendapatan Lain-lain (4259)	6.530.000	1.462	446548,43
<b>Jumlah</b>	<b>19.600.000</b>	<b>29.661.462</b>	<b>-33,92</b>

*Realisasi Belanja* **B.2 Belanja**

*Negara*

*Rp5.088.935.136 -*

Realisasi Belanja Stasiun KIPM Aceh pada TA 2024 pada Tahun 2024 TA 2024 adalah sebesar Rp5.088.935.136 atau 99,47 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.115.816.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024 TA  
2024 (dalam Rupiah)*

URAIAN	TA 2024		% Rael Anggaran
	ANGGARAN	REALISASI	
<b>BELANJA</b>			
Belanja Pegawai	2.613.228.000,	2.613.195.568	100,00
Belanja Barang	2.502.588.000,	2.475.739.568	98,93
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.115.816.000</b>	<b>5.088.935.136</b>	<b>99,47</b>

Realisasi Belanja ada Stasiun KIPM Aceh untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 40.03 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya Belanja Pegawai yang direalisasikan terkait adanya pengalihan anggaran belanja pegawai akibat reorganisasi yang menyebabkan berpindahnya 21 orang pegawai Stasiun KIPM Aceh ke Badan Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Aceh.
2. Menurunnya Belanja Barang terkait anggaran belanja barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki yang sudah di alihkan ke BKHIT Aceh karena reorganisasi
3. Tidak tersedianya pagu anggaran belanja modal di tahun 2024

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
<b>BELANJA</b>			
Belanja Pegawai	2.613.195.568	4.899.474.400,-	46,66
Belanja Barang	2.475.739.568	3.522.245.373,-	29,71
Belanja Modal	-	63.487.865,-	100,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.088.935.136</b>	<b>8.485.207.638</b>	<b>- 40,03</b>

*Belanja Pegawai* **B.3 Belanja Pegawai**

*Rp2.613.195.568*

,-

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.613.195.568,- dan Rp4,899.474.400,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2024 TA 2024 mengalami penurunan sebesar 40.02 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan adanya peralihan anggaran belanja pegawai ke Badan Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Aceh dengan berpindahanya 21 Pegawai sebagai akibat dari reorganisasi .

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.308.659.261	2.334.483.848,	(43,94)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	7.367.932	20.047.830	(63,25)
Belanja Honorarium	0		#DIV/0!
Belanja Lembur	97.089.000	442.418.000,	(78,05)
Kinerja	1.200.079.986,	2.102.710.002,	(42,93)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.613.196.179</b>	<b>4.899.659.680</b>	<b>(46,67)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	611	(185.280,)	(100,33)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.613.195.568</b>	<b>4.899.474.400</b>	<b>(46,66)</b>

*Belanja Barang*

*Rp2.475.739.568*

,-

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.475.739.568 dan Rp.3.522.245.373,- Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami Penurunan (29.071)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pengalihan anggaran dari SKIPM Aceh ke Badan karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Indonesia dari TA 2024.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	757.091.368,	1.130.760.775,	(33,05)
Belanja Barang Non Operasional	49.126.900,	248.608.900,	(80,24)
Belanja Jasa	610.239.362,	409.545.819,	49,00
Belanja Pemeliharaan	450.479.648,	417.605.598,	7,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	545.181.508,	990.610.465,	(44,97)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	63.620.782,	325.113.816,	(80,43)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.475.739.568</b>	<b>3.522.245.373</b>	<b>(29,71)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.475.739.568</b>	<b>3.522.245.373</b>	<b>(29,71)</b>

*Belanja Modal*

*Rp0.-*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp63.537.000,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2024 TA 2024 mengalami penurunan sebesar (100)% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran belanja modal di tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	63.487.865,	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan M	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bar	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>63.487.865</b>	(100,00)
Pengembalian	-	-	#VALUE!
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>63.487.865</b>	<b>-100,00</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Tidak Ada Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2024 sebesar Rp.0dan TA 2023 Rp0,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

***B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin***

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp0.- mengalami penurunan sebesar (100) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp63.487.865.- Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran belanja Modal peralatan dan mesin di tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan mesin	0	63.487.865	-100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>63.487.865</b>	<b>-100,00</b>
Pengembalian	0	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>63.487.865</b>	<b>-100,00</b>

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ada Stasiun KIPM Aceh TA 2024 Rp0,- dan TA 2023 Rp0,- Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun 2024.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Stasiun KIPM Aceh TA 2024 sebesar Rp.0,- dan TA 2023 Rp. Rp0,-. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan di tahun 2024.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya di Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024 TA 2024 dan TA 2023

*Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0,-*

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 TA 2024 dan 2023.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
-	0	0	#DIV/0!
-	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,-*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Stasiun KIPM Aceh per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai

berikut: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan  
2023*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Bank syariah Indonesia 81007364958	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0,-*

**C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0., yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran jasa karantina di SKIPMKHP Aceh langsung ke kas Negara dengan menggunakan transaksi Billing.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan  
2023*

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,-*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 Rp0,- dan 2023 Rp0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023*

<b>Keterangan</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Piutang PNBP Rp0,-*

### **C.4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP TA 2024 dan 2023*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNBP (Pengembalian Tuk	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR* **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**  
*Rp0*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023*

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
<b>Jumlah</b>		-	-

*Bagian Lancar*  
*TPA*  
*Rp0*

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA*

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan*  
*Piutang Tak*  
*Tertagih –*  
*Piutang Lancar*  
*Rp0,-*

### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2024 dan 2023*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Nilai Piutang Jk Pendek</b>	<b>% Penyisihan</b>	<b>Nilai Penyisihan</b>
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		-	-

*Belanja Dibayar di Muka Rp0,*

**C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan 0,- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023*

<b>Jenis</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp0*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima TA 2024 dan 2023*

<b>Jenis</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Persediaan  
Rp40.055.759,-*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp40.055.759,- dan Rp. 67.236.172. Untuk pencatatan persediaan bahan baku di SKIPMKHP ACEH menggunakan dua aplikasi yaitu aplikasi Persediaan dan Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium (SILAB) yang mana perbedaan dari Aplikasi ini adalah Aplikasi Persediaan yang Ada di BMN menggunakan perhitungan dengan satuan Kemasan/Botol sedangkan Aplikasi SILAB menggunakan perhitungan satuan Volume/gram pada TA 2024 tidak ada selisih antara Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SILAB.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023*

Jenis	TH 2024	TH 2023
Barang Konsumsi	21.289.266	67.236.172
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-
Bahan Baku	18.766.493	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>40.055.759</b>	<b>67.236.172</b>

Di Persedian barang yang rusak/usang dengan Nilai biaya Rp0,-

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023*

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
<b>Jumlah</b>		-	-

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

**C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2024 dan 2023*

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0*

**C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA

dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang TA 2024*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Nilai Piutang Jk Panjang</b>	<b>% Penyisihan</b>	<b>Nilai Penyisihan</b>
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-	-	-

*Tanah*

*Rp985.295.000,*

#### **C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Aceh per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 985.295.000- dan Rp1.723.345.000.- Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2024</b>	1.723.345.000
Mutasi tambah:	0
Pengembangan Melalui KDP (208)	0
Mutasi kurang:	738.050.000
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>985.295.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	308 m2	Kantor SKIPM Aceh	273.805.000
2	698 m2	Kantor SKIPM Aceh	662.490.000
3	662 m2	Wilker Sabang	-
4	990 m2	Wilker Simeulue	-
5	3.500 m2	Tanah Aceh Timur (Hibah)	49.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>985.295.000</b>

Tidak ada Tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

*Peralatan dan*

*Mesin*

*Rp.5,382,576,284*

**C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 5,382,576,284,- dan Rp8.779.972.358,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>8.779.972.358</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	293.573.750
Transfer Masuk	
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	0
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	3.690.969.824
Penghentian dari penggunaan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>5.382.576.284</b>
Akumulasi Penyusutan	(4.931.174.176)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>451.402.108</b>

*Gedung dan*

*Bangunan*

*Rp.5.517.949.152,*

*,-*

**C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.5.517.949.152, dan Rp6.897.823.752,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	6.897.823.752
Mutasi tambah:	31.320.000
Penyelesaian pembangunan dgn KDP	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	1.411.194.600
Koreksi Perubahan Nilai Bangunan	
Revaluasi Aset	
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>5.517.949.152</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(869.271.895)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>4.648.677.257</b>

pada periode Tahun 2024 Tahun 2024 Terjadi Mutasi Tambah sebesar Rp31.320.000,- yang merupakan nilai kapitalisasi Gedung dan bangunan tahun 2024 yang kemudian mengalami penyusutan sebesar Rp.(869.271.895) di masa durasi tersebut sehingga mengalami koreksi nilai asset non revaluasi sebesar Rp.28,868,355,-.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp,  
79,716,000*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 79,716,000 dan Rp594.468.400. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	
Mutasi Kurang	79.716.000
Saldo per 31 Desember 2024	
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	29.893.500
Nilai Buku per 31 Desember 2024	49.822.500

Tidak ada penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan pada periode Tahunan Tahun 2024.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp41.802.500,-*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp41.802.500,- dan Rp41.802.500,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-	Monografi	66	41.802.500	0	41.802.500

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan Rp0*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian KDP Gedung Bangunan Instalasi Stasiun KIPM Aceh Sebagai Berikut :

Nomor SP2D	Tanggal SP2D	SPK	Nilai SP2D
-	-	-	-
Jumlah			-

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp.(5,830,339,571)

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp.(5,830,339,571) dan Rp (8.778.053.349) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2024 dan 2023*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	985.295.000	-	985.295.000
2	Peralatan dan Mesin	5.382.576.284	4.931.174.176	451.402.108
3	Gedung dan Banguna	5.517.949.152	869.271.895	4.648.677.257
4	Penyusutan jaringan	79.716.000	29.893.500	49.822.500
5	Aset Tetap Lainnya	41.802.500	0	41.802.500
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>12.007.338.936</b>	<b>5.830.339.571</b>	<b>6.176.999.365</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak  
Berwujud Rp0

### C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2024*

Uraian	Nilai Perolehan
-	0
-	0
Jumlah	0

*Aset Lain-Lain  
Rp0*

### C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	-
Akumulasi Penyusutan	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	-

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp0*

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat

Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN Rp.0*

**C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp12,496,354-*

**C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12,496,354-,- dan Rp11,807,577- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada

Kantor Stasiun KIPM Aceh per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2024*

No	Uraian	Jumlah
1	Utang pihak ketiga langganan internet	4.213.007
2	Utang pihak ketiga langganan Listrik	188.650
3	Utang pihak ketiga langganan telepon	8.094.697
		<b>12.496.354</b>

*Pendapatan*

*Diterima di Muka  
Rp0*

**C.26 Utang Yang Belum di Tagihkan**

Utang yang belum di tagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp,0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian utang yang belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Utang Yang belum di Tagihkan TA 2024*

Uraian	Jumlah
Utang yang belum di tagihkan	-
-	-
-	-
<b>Total</b>	-

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp  
Rp0,-*

**C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
TA 2024 dan TA 2023*

<b>Uraian</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas*

**Rp. 6.204.560.261**

,-

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.204.560.261 dan Rp9.314.787.256,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 19.600.000,- dan Rp 67.797.842 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk Tahun 2024 Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA2024 dan 2023*

<b>URAIAN</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>	<b>NAIK (TURUN ) %</b>
PNBP	19.600.000	67.796.380	(71)
Pendapatan Lain-lain	0	1.462	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>19.600.000</b>	<b>67.797.842</b>	<b>(71)</b>

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar 5.110.000, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya Rp.7.960.000 dan penerimaan kembali beban belanja barang Tahun anggaran 2023 Rp 6.530.000 yang merupakan pengembalian atas belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan Gedung TA 2023 .

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.613.194.070,- dan Rp4.899.474.400,- Beban Pegawai adalah beban atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modals.

*Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	959.318.400,	1.649.340.900,	-41,84
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.150,	23.994,	-41,03
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	62.892.200,	115.008.350,	-45,32
Beban Tunj. Anak PNS	22.062.866,	40.342.048	-45,31
Beban Tunj. Struktural PNS	17.280.000,	17.640.000	-2,04
Beban Tunj. Fungsional PNS	33.945.000,	124.084.876	-72,64
Beban Tunj. PPh PNS	4.250.274,	-	#DIV/0!
Beban Tunj. Beras PNS	52.721.760,	106.457.400	-50,48
Beban Uang Makan PNS	127.844.000,	263.041.000	-51,40
Beban Tunjangan Umum PNS	28.330.000,	18.360.000	54,30
Beban Gaji Pokok PPPK	5.933.000,	14.832.500	-60,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	92,	230	-60,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	550.000,	1.375.000	-60,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	144.840,	362.100	-60,00
Beban Uang Makan PPPK	740.000,	3.478.000	-78,72
Beban Uang Lembur	97.089.000,	442.418.000	-78,05
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.195.352.767,	2.079.081.397	-42,51
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	4.725.721,	23.628.605	-80,00
<b>Total</b>	<b>2.613.194.070,</b>	<b>4.899.474.400,</b>	<b>-46,66</b>

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.821.195,- dan Rp 293.386.953- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis

pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	40.150.206	186.080.002	-78
Beban Persediaan pita cukai, materai	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	6.670.989	107.306.951	-94
Beban Pelepasan aset	-		
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>46.821.195</b>	<b>293.386.953</b>	<b>-84</b>

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.1.417.146.407,- dan Rp.1.788.305.707,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	518.117.071	756.536.366	-32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.593.250	120.712.042	-62
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	3.750.000	-100
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	65.251.200	122.676.000	-47
Beban Barang Operasional Lainnya	130.412.554	130.851.640	-0
Beban Langganan listrik	116.779.331	156.856.219	-26
Beban Bahan	43.780.900	236.698.900	-82
Beban Honor Output Kegiatan	4.896.000	8.160.000	-40
Beban langganan telpon	2.290.676	1.897.340	21
Beban Jasa lainnya	452.775.425	96.432.000	370
Belanja Modal BLU	0	-	# DIV/0!
Beban Langganan Air	0	2.006.200	-100
Beban Jasa Profesi	0	34.250.000	-100
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	450.000	-	# DIV/0!
Beban Sewa	36.800.000	117.479.000	-69
<b>Jumlah</b>	<b>1.417.146.407</b>	<b>1.788.305.707</b>	<b>-31,51</b>

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.450.479.648,- dan Rp 433.817.598. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	T.A. 2024	T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142.244.350	138.149.700	3
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	308.235.298	279.455.898	10
Beban BMP dan Pelumas	0	-	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	-	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	16.212.000	-100
Beban persediaan suku cadang	0	-	-100
<b>Jumlah</b>	<b>450.479.648</b>	<b>433.817.598</b>	<b>3,84</b>

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.545.181.508,- dan Rp.990.610.465,- Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	509.046.508	673.058.879	-24,37
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.035.000	30.000.000	-79,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	-	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.100.000	287.551.586	-89,53
<b>Jumlah</b>	<b>545.181.508</b>	<b>990.610.465</b>	<b>#DIV/0!</b>

### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA2024 dan 2023*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>TH 2024</b>	<b>TH 2023</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosi	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7- dan Rp0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
TA2024dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lainnya	7	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Kegiatan Non Operasional TA2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN ) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0		-
Pendapatan dari Kegiatan Non Oprasional Lainnya	6.530.000	1.462	#####
Surplus Pedapatan dari kegiatan Non Oprasional Lainnya			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Defisit Selsih Kurs			
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>6.530.000</b>	<b>1.462</b>	<b>#####</b>

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

## **E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 an 2023 adalah masing-masing sebesar Rp, 9.314.787.256,- dan Rp. 9.916.185.153,

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(5.520.388.344,) dan Rp (9.018.807.693,) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp43.456.500,- dan Rp0,- Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Koreksi</b>
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>	-

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp28.868.355,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024*

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Nilai Koreksi</b>
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	28.868.355,
Koreksi Nilai Persediaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>28.868.355</b>

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

<b>Jenis Beban</b>	<b>Jumlah Koreksi</b>
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.381,292,994 dan Rp 8.417.409.796, Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih

entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(19.600.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.088.935.136
Transfer Masuk	367.500
Transfer Keluar	2.688.409.642
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.381.292.994</b>

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(19,600,000,-) yang merupakan nilai pendapatan tahun 2024 sedangkan DKEL sebesar Rp5.088.935.136 ,- yang merupakan realisasi anggaran tahun 2024.

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.688.409.642,- yang merupakan Peralihan asset dan bahan Laboratorium ke Badan Karantina Indonesia ,- Sedangkan Transfer masuk sampai dengan tanggal 31

Desember 2024 sebesar Rp 367.500,- berupa Health Certificate H entitas dari Sekretariat Badan.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	2.688.409.642
3	Health Certificate	-	367.500
	<b>Jumlah</b>		<b>2.688.777.142</b>

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

## **F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### **A. Pengungkapan Capaian Rincian Output Perfungsi**

Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci kedalam sebelas fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan Umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban dan Keamanan
4. Ekonomi
5. Lingkungan Hidup
6. Perumahan dan Fasilitas Umum
7. Kesehatan
8. Pariwisata dan Budaya
9. Agama
10. Pendidikan, dan
11. Perlindungan sosial

Capaian rincian output menurut klasifikasi fungsi yang telah di capai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Stasiun Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Aceh antara lain sebagai berikut :

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
3989.PDC.001	Sertifikat Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	30.000.000	27.954.000	93,180%	30	30	Produk	100,00%	
3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	20.000.000	10.083.935	50,420%	20	20	Produk	100,00%	
3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	140.000.000	139.940.724	99,956%	25	25	Lembaga	100,00%	
3989.QIA.001	Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (Inpres 01)	50.000.000	45.363.865	90,728%	2	2	Produk	100,00%	terdapat belanja PNBP senilai 4.335.000 yg tidak direalisasikan karena tidak mencapai target
3989.QIC.001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	12.000.000	10.749.657	89,582%	5	5	Lembaga	100,00%	
3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Survelance UPI)	80.000.000	79.997.206	99,997%	15	15	Lembaga	100,00%	
7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan (Kalibrasi)	55.000.000	53.616.762	97,485%	1	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	
7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu (Bimtek Standar Pengujian)	10.000.000	9.996.958	99,970%	1	1	Lembaga	100,00%	
7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium (ISO 17020)	42.000.000	41.895.359	99,751%	1	1	Lembaga	100,00%	
7010.QIA.001	Unit Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulas (Bimtek QA)	10.000.000	7.443.772	74,438%	1	1	Produk	100,00%	
	Sub Total	449.000.000	427.042.428	95,110%					
	Penyesuaian Revisi	431.913.000	427.042.428	98,872%					

Capaian Output merupakan satu satu indikator di dalam aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran pada IKPA. Indikator Capaian Output mengukur sejauh apa progress dan realisasi dari kinerja yang sudah dilaksanakan. Realisasi capaian output pada SKIPM Aceh Tahun 2024 tercapai 100 persen. Dari target yang telah ditetapkan semua capaian output telah mencapai target sebesar 100 persen di semua kegiatan yang termasuk dalam program Nilai tambah dan Daya saing industri yang termasuk kedalam kegiatan Prioritas Nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

## B. Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 Yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Program Prioritas Nasional Tahun 2024 Pada Stasiun KIPM Aceh terdapat alokasi anggaran untuk prioritas Nasional (PN) yaitu pada prioritas memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Terdapat sembilan Kegiatan Program Prioritas Nasional Tahun 2024 yang menjadi peta jalan (*roadmap*) penerapan ekonomi biru atau pengelolaan laut yang berkelanjutan di Indonesia yang berlandaskan ekologi dalam seluruh aktivitas pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Rincian Pagu anggaran, realisasi anggaran, target dan realisasi rincian output berdasarkan fungsi APBN dan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Sertifikat Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	30.000.000	27.954.000	93,180%	Produk	30	30	100,00%
Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya (Inpres 01)	50.000.000	45.363.855	90,728%	Produk	2	2	100,00%
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	12.000.000	10.749.857	89,582%	Lembaga	5	5	100,00%
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Survalance UPI)	80.000.000	79.997.206	99,997%	Lembaga	15	15	100,00%
Sub Total	172.000.000	164.064.918	95,387%				

- C.** Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh melakukan pengalihan aset ke Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Aceh yang berupa Barang Milik Negara Sebanyak 135 unit senilai Rp.5.725.498.025,-
- D.** Berdasarkan koreksi BPK Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh pada Periode 31 Desember 2024 melakukan Transfer keluar berupa bahan laboratorium senilai Rp43.456.500,00 ke Badan Karantina Ikan Hewan dan Tumbuhan Berdasarkan dengan BAST Nomor B.3322/SKIPM.ACH/PL.760/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024, Berupa :

No	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Satuan	Nilai per Kemasan	Utuh / Sebagian
1	Q Real EHP 200RXN	00035	1	Box	43.456.500	Utuh

- E.** Pengawasan Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Periode 31 Desember 2024 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh, mempunyai akun- akun signifikan, diantaranya :

UNIT KERJA	KODE AKUN	URAIAN AKUN
649589 STASIUN KIPM ACEH	116111	Kas Di Bendahara Pengeluaran
	117131	Bahan Baku
	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, dan Standardisasi Lainnya
	132111	Peralatan dan Mesin